

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PERUBAHAN)**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangkaanggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SLPD sesuai Tupoksinya.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024

1.2.Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

B. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIA DPRD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pada Bab ini membuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Sekretariat DPRD tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa belanja tidak langsung dan Belanja Langsung pada APBD Tahun 2024

Berdasarkan Renja Tahun 2024 terdapat 2 Program dan 16 Kegiatan pada Sekretariat DPRD, keseluruhan program dan kegiatan tersebut terealisasi dalam DPA Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya tujuan yang dikehendaki, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai entry poin dalam penyusunan perencanaan tahun 2024
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sampai denga Triwulan II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Tabel 2.1
Capaian Kinerja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s/d TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TERGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5(4/3)
Sekretariat DPRD				
RATA – RATA KINERJA :				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100	50	0.5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	46	0.46
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan Perencanaan PD	100	20	0.2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan RKA SKPD	100	32	0.32
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan RKA Perunahan SKPD	100	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan	100	70	0.7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100	70	0.7
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	70	0.7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Persentase ketersediaan Pakaian Dinas beserta Atribuhnya	100	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	50	0.5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100	50	0.5
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	0	0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Presentase jenis barang cetak/penggandaan yang diadakan	100	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	100	50	0.5
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	40	0.4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah	100	0	0
Pengadaan Mebel	Presentase mebeleuir yang diadakan	100	0	0
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	PresatneserJumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	100	0	0

TABEL 2.1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	40	0.4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	50	0.5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	40	0.4
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	40	0.4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100	40	0.4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100	40	0.4
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	100	40	0.4
Pmeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Presentase Jumlah gedung yang direhabilitasi/dipelihara	100	0	0
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Anggota DPRD	100	70	0.7
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100	70	0.7
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan Layanan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100	100	1
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Presentase Pakaian yang diadakan	100	0	0
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksannya layanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100	50	0.5
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	50	0.5
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Presentase penyediaan administrasi perkantoran dan rapat koordinasi/konsultasi	100	50	0.5
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Tersedianya Pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan Fungsi Anggota DPRD	100	40	0.4
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Prodak daerah yang dihasilkan	100	40	0.4
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	40	0.4
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	40	0.4
Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0

TABEL 2.1

Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksanannya Cakupan layanan TUSI Anggota DPRD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasab KUA dan PPAS	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan APBD	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan APBD Perubahan	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan Laporan Semesteran	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	0	0
Pengaawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya monitoring dan evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100	40	0.4
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	87	0.87
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	0	0
Pengawasan Ukuran Pemerintahn Bidang Kesejahteraan Rakyat	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	0	0
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kelapa Daerah	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	0	0
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksanannya peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	100	80	0.8
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase Penyediaan Jasa Perkantoran	100	70	0.7
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase Penyediaan Jasa Perkantoran	100	70	0.7
Penyediaan tenaga ahli fraksi	Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	100	70	0.7
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui pengawasan	100	50	0.5
Pendalaman Tugas DPRD	Prentase Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100	79	0.79
Penyerapan dan Penghinpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksanannya penyerapan aspirasi/pengaduan masyarakat yang ditindalanjuti	100	0	0
Pelaksanaan Reses	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Reses	100	0	0
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksanannya kegiatan rapat AKD	100	0	0
Penyusunan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan Rapat- rapat AKD	100	0	0
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksanannya peningkatan kapasitas pimpinan DPRD	100	50	0.5
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	100	50	0.5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, di perlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dari 2 program yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, realisasinya 49 Persen (%) dari target 100 Persen (%)

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, beberapa kegiatan masih jauh dari target disebabkan :

- Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD, dimana realisasinya tidak mencapai 100% yang ditetapkan menjadi Prodak Hukum Daerah, selanjutnya minimnya penyerapan realisasi anggaran pada program penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2024 ini. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dari uraian diatas, secara keseluruhan realisasi program dan kegiatan baik keuangan maupun fisik untuk tahun 2024 sama baiknya dengan tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

- a. Tidak semua alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan)
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
- c. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
- d. Pelaksanaan fungsi Dewan yang terhambat kendala yuridis formal.
- e. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

- f. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
- g. Penyesuaian antara Anggaran Kas yang Masuk dengan Permintaan Pembayaran setiap belanja untuk setiap kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:

- a. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.
- b. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program, kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran.
- c. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta system pelayanan dengan mempedomi peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
- Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga menyebabkan kinerja pegawai menjadi lambat.
- Kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan pengambilan pekerjaan menjadi terhambat.
- Latar belakang pendidikan para Anggota Dewan satu sama lainnya berbeda sehingga pembahasan materi yang sama berulang-ulang sehingga memerlukan waktu yang lama.

- Pemahaman terhadap suatu permasalahan masing-masing Anggota Dewan mempunyai persepsi yang berbeda.
- Kurang referensi didalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal.
- Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Tantangan
 - Dinamika kegiatan DPRD
 - Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.
- Peluang
 - Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
 - Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
 - Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD.

2.3.4. Formulasi dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

- Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Kebijakan Strategis

- Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
- Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
- Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
- Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
- Penambahan daya dukung finansial dan non finansial.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi
- Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD
- Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program dan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **19.582.404.923,-**

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Umum

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- i. Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD

Untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai dikarenakan banyaknya usulan dari masing masing Alat Kelengkapan DPRD.

2.4.2. Alasan Proses Tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja 2024 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan Setelah Proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renja Tahun 2024 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat, karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada DPRD baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Dari hasil telaahan dan sinkronisasi kebijakan nasional diatas ditetapkan Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya ;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan parawisata;
4. Memantapkan pemeretaan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal;

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditetapkan program dan kegiatan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan Diklat/Bimtek/Pelatihan dan aktif berperan serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN serta pelaksanaan pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui kegiatan sosial terhadap peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyerapan informasi melalui kegiatan Reses.

Tabel 3.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD s / d Bulan Juni 2024

SKPD : Sekretaris DPRD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN INDIK 2024		PAGU APBD 2024		RENCANA PERUBAHAN 2024		Bertambah / (Berkurang)	Catatan
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	7	8	9	10		11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100	19,782,266,693	100	19,782,266,693	100	20,683,643,333	901,376,640	Penambahan Anggaran berdasarkan beberapa kebutuhan belanja di sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan Tuga dalam rangka memfasilitasi TUSI Pimpinan dan Anggota DPRD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	296,104,150	100	296,104,150	100	296,104,150		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan Perencanaan PD	100	129,217,450	100	129,217,450	100	129,217,450		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan RKA SKPD	100	94,784,400	100	94,784,400	100	94,784,400		
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemenuhan Cakupan Dokumen Penyusunan RKA Perubahan SKPD	100	72,102,300	100	72,102,300	100	72,102,300		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Administrasi Keuangan	100	2,204,842,710	100	2,204,842,710	100	2,204,842,710		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100	1,741,506,670	100	1,741,506,670	100	1,741,506,670		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	200,500,000	100	200,500,000	100	200,500,000		
2.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Persentase ketersediaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	100	200,500,000	100	200,500,000	100	200,500,000		
2.3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jaja Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	62,336,040	100	62,336,040	100	62,336,040		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	355,497,300	100	355,497,300	100	355,497,300		
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi perkantoran dan Rapat rapat koordinasi/konsultasi	100	11,014,500	100	11,014,500	100	11,014,500		
3.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Penyediaan Adm Perkantoran dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100	5,005,000	100	5,005,000	100	5,005,000		
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Adm Perkantoran dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100	272,843,000	100	272,843,000	100	272,843,000		
3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	66,634,800	100	66,634,800	100	66,634,800		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah	100	74,428,500	100	74,428,500	100	74,428,500		
4.1	Pengadaan Mebel	Persentase pembelian yang diadakan P esatneser/jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	100	28,998,500	100	28,998,500	100	28,998,500		
4.2	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		100	45,430,000	100	45,430,000	100	45,430,000		

Tabel 3.1

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1,144,255,584	100	1,144,255,584	100	2,045,632,224	901,376,640	Honorarium Pegawai Tidak Tetap
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100	10,062,000	100	10,062,000	100	10,062,000		
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	126,042,804	100	126,042,804	100	126,042,804		
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	1,008,150,780	100	1,008,150,780	100	1,909,327,420	901,376,640	Honorarium Pegawai Tidak Tetap
6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	515,220,174	100	515,220,174	100	515,220,174		
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan d' nas yang terpelihara	100	161,480,000	100	161,480,000	100	161,480,000		
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Persentase kendaraan d' nas yang terpelihara	100	202,700,000	100	202,700,000	100	202,700,000		
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin lainnya yang terpelihara	100	22,570,000	100	22,570,000	100	22,570,000		
6.4	Pmeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Presentase jumlah gedung yang direhabilitasi/dipelihara	100	128,470,174	100	128,470,174	100	128,470,174		
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Anggota DPRD	100	8,099,212,683	100	8,099,212,683	100	8,099,212,683		
7.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayerinya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100	7,949,212,683	100	7,949,212,683	100	7,949,212,683		
7.2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan Layanan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000		
8	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100	7,092,705,592	100	7,092,705,592	100	7,092,705,592		
8.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	6,806,007,000	100	6,806,007,000	100	6,806,007,000		
8.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Presentase penyediaan administrasi perkantoran dan rapat koordinasi/konsultasi	100	286,698,592	100	286,698,592	100	286,698,592		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Tersedianya Pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan Fungsi Anggota DPRD	100	6,240,578,278	100	6,240,578,278	100	6,578,578,278	338,000,000	Pena mbahan Anggaran Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Honorarium tenaga ahli fraksi
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Prodak daerah yang dihasilkan	100	205,950,850	100	205,950,850	100	205,950,850		
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	98,658,550	100	98,658,550	100	98,658,550		
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	15,202,000	100	15,202,000	100	15,202,000		
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	17,465,300	100	17,465,300	100	17,465,300		
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	70,500,000	100	70,500,000	100	70,500,000		
2.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	4,125,000	100	4,125,000	100	4,125,000		
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Cakupan layanan TUSI Anggota DPRD yang difasilitasi	100	164,032,900	100	164,032,900	100	164,032,900		
2.2.1	Pembahasab KUA dan PPAS	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	16,500,000	100	16,500,000	100	16,500,000		
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	17,457,600	100	17,457,600	100	17,457,600		

2.2.3	Pembahasan APBD	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	44,000,800	100	44,000,800		
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	52,603,450	100	52,603,450		
2.2.5	Pembahasan Laporan Semesteran	Presentase rapat AKD yang difasilitasi	100	18,036,750	100	18,036,750		
2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Presentase rapat paripurna yang difasilitasi	100	15,434,300	100	15,434,300		
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pimpinan dan Anggota DPRD	100	127,269,000	100	127,269,000		
3.1.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	41,433,600	100	41,433,600		
3.1.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	49,682,750	100	49,682,750		
3.1.3	Pengawasan Ukuran Pemerintahn Bidang Kesejahteraan Rakyat	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	10,690,500	100	10,690,500		
3.1.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	9,625,000	100	9,625,000		
3.1.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	10,749,650	100	10,749,650		
3.1.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kelapa Daerah	Presentase pengadauan masyarakat yang difasilitasi	100	5,087,500	100	5,087,500		
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	100	2,314,253,048	100	2,314,253,048		
4.1.1	Pendalaman Tugas DPRD	Presentase Penyediaan Jasa Perkantoran	100	1,290,170,800	100	1,290,170,800		
4.1.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase Penyediaan Jasa Perkantoran	100	513,300,000	100	513,300,000		
4.1.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	100	343,000,000	100	343,000,000	Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	329,000,000
4.1.4	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui pengawasan	100	135,000,000	100	144,000,000	Honorarium tenaga ahli fraksi	9,000,000
4.1.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prentase Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100	32,782,248	100	32,782,248		
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi/pengabulan masyarakat yang ditindalanjuti	100	112,836,650	100	112,836,650		
5.1.1	Pelaksanaan Reses	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Reses	100	112,836,650	100	112,836,650		
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya kegiatan rapat AKD	100	5,456,750	100	5,456,750		
6.1.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan Rapat- rapat AKD	100	5,456,750	100	5,456,750		
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan DPRD	100	3,310,779,080	100	3,310,779,080		
7.1.1	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	100	3,310,779,080	100	3,310,779,080		

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

a. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

b. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi dan perumusan kebijakan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan ketugasan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana,

keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi dan perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis SKPD serta Visi Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2024 ini terbagi dalam 2 program dengan 16 kegiatan

Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2024:

1. Program Administrasi Umum
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - i. Layanan Administrasi DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD

3.3.3 Kesesuaian Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

3.3.4 Tabel Rencana Program Kegiatan

Tabel Rencana Program dan Kegiatan hasil pengerjaan sebagai berikut di jelaskan dalam Tabel 3.1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bagi Satuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2024 yang menindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan public baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya anggaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplemantasikan kedalam program dan kegiatan. Program yang tecantum ke dalam Renja Sekretariat DPRD ini dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasran adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perhitungan pagu anggaran Program Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran tahun 2024 diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik dari tahun sebelumnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

Boroko, 10 Juli 2024
Sekretaris DPRD

VICTOR F. NANLESSY, S.Pi, M.Si
Nip. 19700429 199603 1 005